

Pengaruh Penerimaan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah setelah Penerapan E-Samsat

Rizal Sukma Aliyudin¹, Eva Fauziah Ahmad², Rizka Azalia Maknunah³

¹Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia

²Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia

³Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia

Histori Artikel

Dikirim: 27-09-2022

Diterima: 07-10-2022

Keywords:

Local Own-source

Revenue;

Motor Vehicle Tax;

Motor Vehicle Transfer

Fee

Kata Kunci:

Pendapatan Asli Daerah;

Pajak Kendaraan

Bermotor;

Biaya Transfer

Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

Local Own-source Revenue is income obtained by the region which is collected based on regional regulations under statutory regulations originating from various sources located in the area consisting of regional taxes, regional levies, separated regional wealth management, and other legitimate income. Local Own-source Revenue of Majalengka Regency is still not stable, as seen from the receipt of motor vehicle taxes and transfer fees for motorized vehicles which have fluctuated in realization. Therefore, this study aims to determine the effect of motor vehicle taxes and transfer fees for motorized vehicles on local own-source revenue after the implementation of e-samsat in Majalengka Regency. The research approach used in this research is descriptive analysis and verification using secondary data. The population in this study is the Realization of Regional Original Revenue Reports, especially motor vehicle taxes and transfer fees for motorized vehicles in Majalengka Regency for the 2018-2020 period. While the sample in this study was determined using the census sampling method or saturated sampling so 36 samples were obtained from January 2018 - December 2020. The analytical method used in this study was a multiple linear regression analysis carried out with the help of SPSS 25 software. Based on the research that has been done, it is obtained that the motor vehicle tax has a positive effect on local own-source revenue of Majalengka Regency and the return duty for motorized vehicles has a negative effect on the local own-source revenue of Majalengka Regency.

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari berbagai sumber yang berada di daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka masih belum stabil, terlihat dari penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang realisasinya fluktuatif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah setelah penerapan e-samsat di Kabupaten Majalengka. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan verifikatif dengan menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kabupaten Majalengka periode 2018-2020. Sedangkan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode sensus

* Corresponding Author

Email : rizkaazaliam@gmail.com

sampling atau sampling jenuh sehingga diperoleh 36 sampel dari bulan Januari 2018 – Desember 2020. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yang dilakukan dengan bantuan software SPSS 25 . Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka dan Bea Balik Kendaraan Bermotor berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka. Daerah.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi membuat era keterbukaan informasi semakin terbuka lebar. Ini juga terjadi di setiap instansi pemerintah mulai dari pusat, provinsi hingga kabupaten/ kota. Keterbukaan ini sangat penting agar masyarakat dapat secara langsung memantau berbagai kebijakan dan perkembangan di wilayah tersebut. Termasuk penggunaan anggaran di masing- masing instansi pemerintah. Masalah keterbukaan ini sangat penting, sebagai landasan dalam pembangunan di kawasan ini. Masyarakat menginginkan transparansi keuangan regional sehingga mereka dapat berkontribusi untuk pemantauan langsung dan pemantauan. Dengan keterbukaan ini, pembangunan akan dimaksimalkan dan meminimalkan penyalahgunaan atau penyalahgunaan anggaran keuangan daerah. Dengan begitu, akan mungkin untuk mewujudkan pembangunan yang mengambil sisi dari rakyat dan menciptakan pemerintahan yang baik (Miftahul Akla,2019).

Menurut Mia Sukmawati, (2018) Substansi Otonomi Daerah adalah peningkatan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan memperkecil mata rantai kendali pemerintah yang mana setiap daerah memiliki otoritas untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Maka dari itu, setiap daerah mempunyai kewenangan untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah yang kemudian dialokasikan untuk mensejahterakan span of control-nya. Penekanan dan peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan dari pajak daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang- undangan yang berlaku, termasuk di antaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama. (Muhammad Muchtar, M.Faisal Abdullah , Dwi Susilowati, 2017).

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak, dengan dasar hukum Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah, Berdasarkan kewenangan tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di wilayah Daerah Provinsi Jawa barat diatur lebih rinci oleh Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Dilansir melalui berita online ciremay.com, Majalengka. Senin (28/12/2020). Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada penghujung tahun 2020 ini berhasil mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sector perpajakan hingga Rp 113 miliar. Namun jumlah tersebut melenceng dari target PAD

pajak sebesar Rp 133 miliar atau hanya terealisasi 87% karena sejumlah faktor. Paling terasa adalah dampak dari pandemi COVID-19. Menurut Aeron Randi selaku kepala BAPENDA, selama 1 tahun ini, pihaknya telah berusaha keras untuk memungut pajak dari 9 sumber pajak yang dikelola. Aeron optimistis bisa mengumpulkan pajak hingga 90 persen dari target di sisa tahun 2020.

Gambar 1 Realisasi PAD Kabupaten Majalengka Tahun 2020



Sumber : Kementerian Keuangan (2021)

Berdasarkan pada data yang terdapat dalam Gambar 1. dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, total pendapatan Kabupaten Majalengka pada 2020 mencapai Rp3,24 triliun. Dana perimbangan menjadi penopang terbesar pembangunan Kabupaten Majalengka dengan kontribusi senilai Rp1,64 triliun atau 51% dari total pendapatan. Selanjutnya, realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah tercatat berkontribusi senilai Rp1,10 triliun atau 34% dari total pendapatan tahun yang bersangkutan. Sementara itu, pendapatan asli daerah (PAD) berkontribusi paling rendah, yaitu hanya senilai Rp490,88 miliar atau 15% dari total pendapatan Kabupaten Majalengka pada 2020. Apabila ditelusuri lebih jauh, realisasi PAD Kabupaten Majalengka didominasi dari sumber lain-lain PAD yang sah mencapai Rp347,57 miliar atau 71% dari total PAD. Selanjutnya, pajak daerah berkontribusi senilai Rp119,12 miliar atau 24% dari total PAD. Sementara itu, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi yang rendah dengan total realisasi berturut-turut senilai Rp17,63 miliar dan Rp6,55 miliar. (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,2020).

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu "Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Setelah Penerapan E-Samsat di Kabupaten Majalengka". Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak kendaraan bermotor setelah penerapan e- samsat terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Majalengka periode 2018-2020.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh bea balik nama kendaraan bermotor setelah penerapan e-samsat terhadap.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Operasi variabel Pajak Kendaraan Bermotor, diukur dengan rumus:

$$\text{PKB terutang} = \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Keterangan:

Dasar Pengenaan Pajak = Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) x bobot

Sumber : Novi Indriani (2018)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 ayat 13, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Operasi variabel Pajak Kendaraan Bermotor, diukur dengan rumus:

$$\text{PBBN-KB} = \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor} \times \text{Tarif}$$

Sumber : Novi Indriani (2018)

Pendapatan Asli Daerah

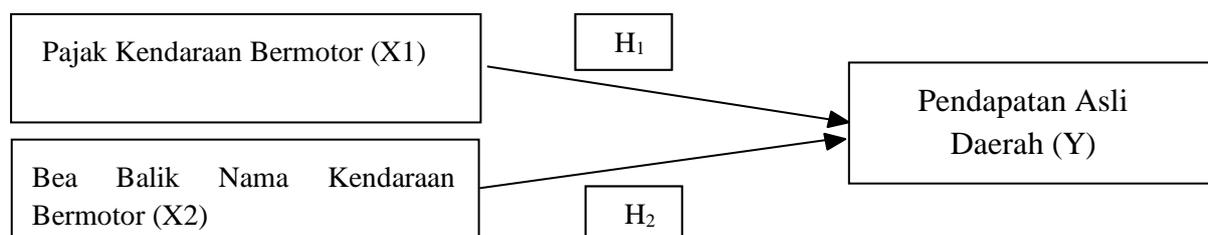
Menurut Halim (2014), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 18, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Operasi variabel Pendapatan Asli Daerah, diukur dengan rumus:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah}$$

Sumber : Novi Indriani (2018)

Hipotesis

Gambar 2. Paradigma Penelitian



H1 : Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H2 : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

C. METODE

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kabupaten Majalengka tahun 2018- 2020 dengan rincian dari bulan Januari sampai bulan Desember, sehingga diperoleh 36 sampel. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan metode Sampling Sensus atau Sampling Jenuh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang sudah ada berupa laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah dan studi pustaka berupa jurnal, buku, artikel, penelitian terdahulu. Analisis data menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, analisis koefisien determinasi, uji kelayakan model dan uji hipotesis secara parsial..

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 1 Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	36	22.85	25.42	24.2108	.58490
PKB	36	21.35	22.00	21.7067	.16293
BBNKB	36	20.40	21.66	21.2199	.30124
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Output SPSS 25, diolah sendiri 2022.

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian. Nilai minimum pendapatan asli daerah sebesar 22,85 dan nilai maksimum 25,42 dengan nilai rata- rata pendapatan asli daerah sebesar 24,2108. Nilai minimum pajak kendaraan bermotor sebesar 21,35 dan nilai maksimum 22,00 dengan nilai rata-rata pendapatan asli daerah Uji Normalitas sebesar 21,7067. Nilai minimum bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 20,40 dan nilai maksimum 21,66 dengan nilai rata-

rata pendapatan asli daerah sebesar 21,2199. Nilai standar deviasi masing-masing variabel lebih kecil dari rata-rata berarti data tersebut memiliki besaran data yang baik (tidak acak).

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.55052032
Most Extreme Differences	Absolute	.097
	Positive	.073
	Negative	-.097
Test Statistic		.097
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

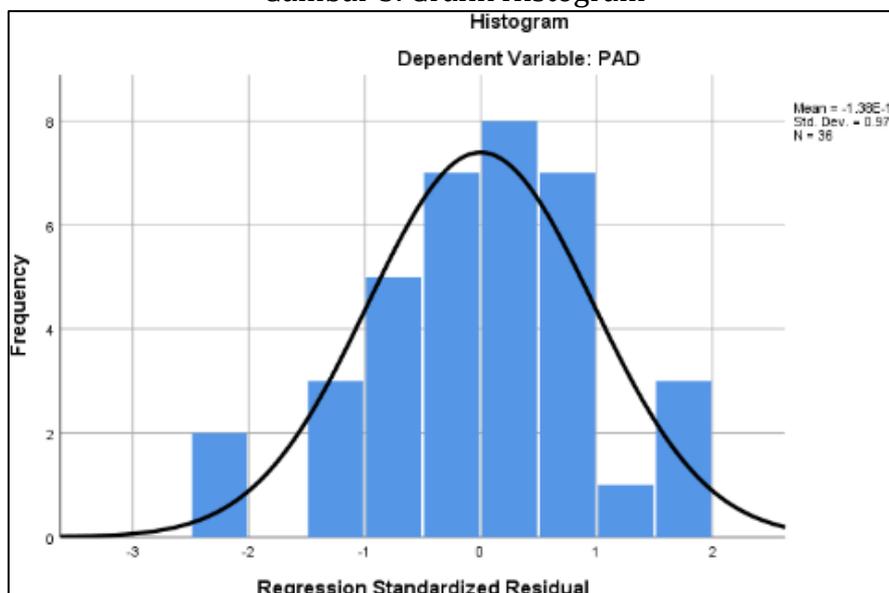
c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output SPSS 25, diolah sendiri 2022.

Diketahui bahwa nilai K-S untuk variabel pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah adalah sebesar 0,097 dengan Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200 dan lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa data pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah dapat dikategorikan nilai residual terdistribusi normal atau uji normalitas terpenuhi.

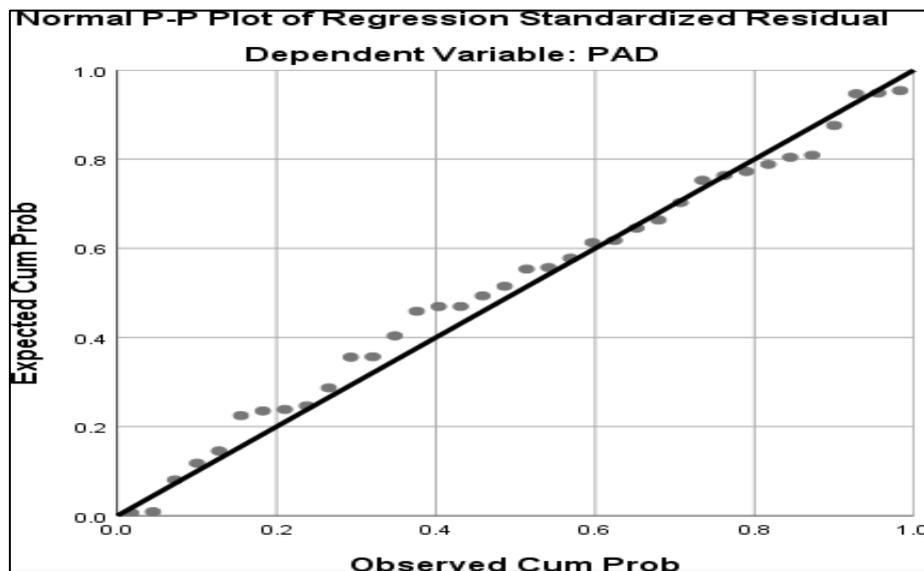
Gambar 3. Grafik Histogram



Uji Multikolinearitas

Grafik Histogram hasil uji normalitas pada Gambar 3 di atas menunjukkan bahwa data terdistribusi normal, karena grafik histogram tidak condong ke kiri maupun ke kanan.

Gambar 4. P-Plot



Dari gambar 4 dapat terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, dengan penyebaran mengikuti arah garis diagonal yang artinya data tersebut terdistribusi normal.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
	(Constant)	1.268	12.872		.098	.922		
1	PKB	1.330	.646	.371	2.061	.047	.830	1.204
	BBNK B	-.280	.349	-.144	1.801	.029	.830	1.204

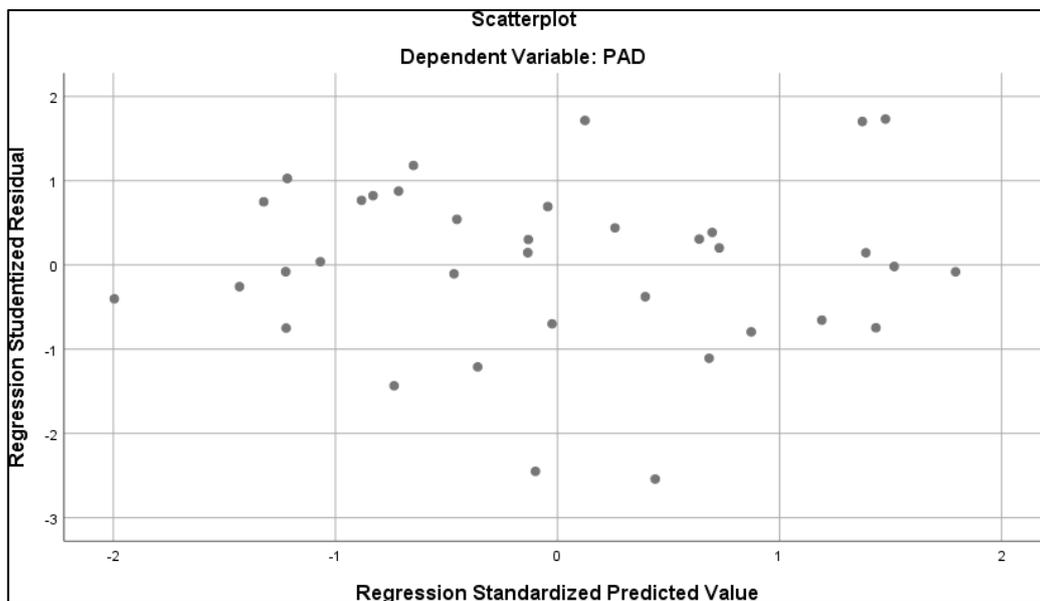
a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Output SPSS 25, diolah sendiri 2022.

Berdasarkan tabel 3 Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor memiliki VIF 1,204 < 10 dengan perhitungan nilai tolerance 0,830 > 0,10 dan bea balik nama kendaraan bermotor memiliki VIF 1,204 < 10 dengan hasil tolerance 0,830 > 0,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 5. Scatterplot



Berdasarkan gambar 5 di atas pada grafik scatterplot, terlihat bahwa terjadi penyebaran nilai-nilai residual terhadap pendapatan asli daerah di tunjukan menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Dengan demikian, asumsi heteroskedastisitas terpenuhi atau model regresi linier berganda terbebas dari asumsi klasik heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.338 ^a	.114	.060	.56696	2.314

a. Predictors: (Constant), BBNKB, PKB
 b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Output SPSS 25, diolah sendiri 2022.

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4 maka didapat nilai DW (Dubin- Watson) = 2.314 untuk menentukan nilai d_u dan d_l dapat dilihat pada tabel Durbin- Watson. Karena $n=36$ dan $k=2$ (jumlah variabel independen), maka nilai $d_l = 1.3537$ dan nilai $d_u = 1.5872$. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai $d_u < d < 4 - d_u$ dimana $1.5872 < 2.314 < (4 - 1.5872)$, artinya tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.		
Model		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.268	12.872		.098	.922		
	PKB	1.330	.646	.371	2.061	.047	.830	1.204
	BBNKB	-.280	.349	-.144	-1.801	.029	.830	1.204

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Output SPSS 25, diolah sendiri 2022.

Berdasarkan hasil analisis SPSS versi 25 pada tabel 5 di atas, dapat diketahui persamaan regresi bergandanya adalah sebagai berikut :

$$Y = 1,268 + 1,330X_1 - 0,280X_2 + e$$

Dari setiap penurunan 1 satuan pada pajak kendaraan bermotor maka akan menurunkan pendapatan asli daerah sebesar 1,330 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan (bernilai 0). Dari persamaan regresi berganda tersebut dapat diartikan sebagai berikut :

1. Konstanta dalam model regresi sebesar 1,268 bertanda positif yang artinya, jika pajak kendaraan bermotor (X₁) dan bea balik nama kendaraan bermotor (X₂) memiliki nilai (nol) maka pendapatan asli daerah (Y) akan bernilai sesuai dengan nilai konstanta sebesar 1,268.
2. Koefisien regresi pajak kendaraan bermotor (X₁) sebesar 1,330 bertanda positif. Artinya jika variabel pajak kendaraan bermotor meningkat 1 satuan, maka akan menaikkan pendapatan asli daerah sebesar 1,330. Begitupun sebaliknya
3. Koefisien regresi bea balik nama kendaraan bermotor (X₂) sebesar 0,280 bertanda negatif. Artinya jika variabel bea balik nama kendaraan bermotor meningkat 1 satuan, maka akan menurunkan pendapatan asli daerah sebesar 0,280. Begitupun sebaliknya setiap penurunan 1 satuan pada bea balik nama kendaraan bermotor maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 0,280 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan (bernilai 0).
4. Epsilon adalah kesalahan pengganggu yaitu kesalahan yang terjadi pada pikiran/ramalan pendapatan asli daerah yang disebabkan karena masih ada faktor lain selain pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah tetapi tidak diperhitungkan (tidak dimasukkan dalam persamaan).

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 6 Hasil Koefisien Determinasi

		Model Summary ^b			
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.338 ^a	.114	.060	.56696	2.314

a. Predictors: (Constant), BBNKB, PKB

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Output SPSS 25, diolah sendiri 2022.

Berdasarkan tabel 6 di atas diperoleh nilai R² sebesar 0,114 atau 11,4%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dapat dijelaskan sebesar 11,4% oleh variabel independen yaitu pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan 88,6% variasi pendapatan asli daerah dijelaskan oleh variabel-variabel di luar variabel independen penelitian ini.

Uji Kelayakan Model

Tabel 7 Hasil Uji Kelayakan Model

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.366	2	.683	5.125	.035 ^b
	Residual	10.608	33	.321		
	Total	11.974	35			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), BBNKB, PKB

Sumber: Output SPSS 25, diolah sendiri 2022.

Berdasarkan hasil analisis SPSS versi 25 pada tabel 7 di atas, dapat diketahui bahwa besarnya nilai Fhitung > Ftabel yaitu 5,125 > 3,26 dengan nilai signifikan 0,035 < 0,05, artinya model yang dipilih yaitu pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sudah tepat (fit) dalam memprediksi pendapatan asli daerah.

Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 8 Hasil Uji Hipotesis t

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.268	12.872		.098	.922		
	PKB	1.330	.646	.371	2.061	.047	.830	1.204
	BBNKB	-.280	.349	-.144	-1.801	.029	.830	1.204

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Output SPSS 25, diolah sendiri 2022 Berdasarkan tabel 8 dapat

disimpulkan mengenai uji hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dijelaskan uji hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Pada variabel pajak kendaraan bermotor diperoleh nilai thitung sebesar 2,061 bertanda positif dengan tingkat signifikan 0,047. Pada derajat bebas (dk) = n - k = 36 - 2 = 34 dengan tingkat signifikan 5% sehingga diperoleh nilai ttabel sebesar 1,69092. Karena thitung 2,061 > 1,69092 dan nilai signifikan 0,047 < 0,05 maka Ho ditolak. Hal ini berarti pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
2. Pada variabel bea balik nama kendaraan bermotor diperoleh nilai thitung sebesar -1,801 bertanda negatif dengan tingkat signifikan 0,029. Pada derajat bebas (dk) = n - k = 36 - 3 = 34 dengan tingkat signifikan 5% sehingga diperoleh

nilai t tabel sebesar 1,69092. Karena $t_{hitung} = -1,801 > -1,69092$ dan nilai signifikan $0,029 < 0,05$ maka H_0 ditolak. Hal ini berarti bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan H_1 diterima artinya pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah pungutan pajak kendaraan bermotor akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil penelitian ini yang diketahui adalah pada tahun 2018 pajak kendaraan bermotor menyumbang angka 6,9% dari total pendapatan asli daerah Kabupaten Majalengka, hal ini mengalami kenaikan pada tahun 2019 yaitu sebesar 7,8% dari total pendapatan asli daerah, namun penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020 mengalami penurunan sehingga pada tahun 2020 pajak kendaraan bermotor hanya menyumbang angka 6,6% dari total pendapatan asli daerah Kabupaten Majalengka.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul Aliah, Abu Bakar Hamzah, dan Muhammad Nasir (2019) menyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor secara signifikan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Semakin besar pajak kendaraan bermotor maka akan menaikkan pendapatan asli daerah.

Pengaruh Bea Balik Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan H_2 diterima artinya bea balik kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil penelitian ini yang diketahui adalah pada tahun 2018 bea balik nama kendaraan bermotor menyumbang angka 4,5% dari total pendapatan asli daerah Kabupaten Majalengka, hal ini mengalami kenaikan pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,6% dari total pendapatan asli daerah, namun penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun 2020 mengalami penurunan sehingga pada tahun 2020 pajak kendaraan bermotor hanya menyumbang angka 3,4% dari total pendapatan asli daerah Kabupaten Majalengka.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Djodi Setiawan dan Mia Isporima (2021) menyatakan bahwa bea balik nama kendaraan bermotor secara parsial terdapat pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Semakin besar jumlah pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor, akan meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Epan Saputra dan Narti Eka Putri (2020) menyatakan bahwa bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh secara positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

E. SIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Majalengka periode 2018-2020. Maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Artinya semakin tinggi penerimaan pajak kendaraan bermotor, maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah

2. Bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah. Artinya semakin tinggi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor, maka akan menurunkan pendapatan asli daerah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, peneliti memberikan saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan untuk dijadikan rekomendasi atau masukan yang bermanfaat yaitu:

1. Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan demikian Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu memaksimalkan pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dengan lebih meningkatkan sosialisasi seperti membuat acara pada kegiatan car free day atau membuat edukasi mengenai membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu dan dengan adanya penerapan e- samsat yang memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor di berbagai sosial media agar lebih banyak masyarakat yang menerima informasi mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga diharapkan pemerintah bisa menaikkan kesadaran wajib pajak agar dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan demikian akan meningkatkan pula pendapatan asli daerah.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Majalengka harus melakukan penindakan yang tegas untuk wajib pajak yang belum mendaftarkan ataupun membalik namakan kendaraan bermotor mereka dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak tepat waktu, agar penerimaan dari sektor bea balik nama kendaraan bermotor dapat diperoleh secara maksimal.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah, seperti retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan, lain-lain pendapatan yang sah. Selain itu diharapkan menambah periode pengamatan, agar perbandingan dari setiap bulan lebih terlihat. Serta menggunakan sampel, sebaiknya sampel penelitian tidak hanya di Kabupaten Majalengka.

REFERENSI

- Carunia Mulya Firdausy. 2017. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Djodi Setiawan dan Mia Isporima. 2021. Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2019. Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung Volume 5, Nomor 3, November 2021 (23-36) (P-ISSN 2087-4742).
- Dwi Anggraeni Saputri dan Angga Jaya Saputra. 2020. Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Periode Tahun 2016- 2018. Vol. 4, No. 1 April 2020 hal. 36-58 P ISSN 2622-7177 E ISSN 2623-1778.
- Fitri Yani Panggabean dan Desti Rinika. 2020. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada

- Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik* Vol. 11 No. 2 Januari 2020 ISSN: 2087-4669.
- Grace Carlyn Mesoino, Amran T. N, dan Hanly F. Dj. Siwu. 2020. Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Dan Sesudah Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Online Berbasis E-Samsat Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 20 No. 02 Tahun 2020.
- Habibah Nurul Fitri, Rahma Nazila Muhammad dan Mia Rosmiati. 2021. Analisis Kebijakan Penerapan E-SAMSAT Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada BAPENDA Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal* Vol. 1, No. 2, February 2021, pp. 339 – 348 ©Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung.
- Iman Ghozali. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mia Sukmawati, J. F. I. 2018. Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. *Industrial Research Workshop and National Seminar*. Polban: 1056–1068.
- Miftahul Akla (2019). Transparansi Keuangan Daerah Dalam Perspektif Islamic Good Governance. *Jurnal Muslim Heritage*. vol. 4 No 1, Mei 2019.
- Muhammad Muchtar, M.Faisal Abdullah dan Dwi Susilowati (2017). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi* Vol 1 Jilid 3/Tahun 2017 Hal. 385 – 399.
- Novi Indriani. 2018. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKN) Terhadap Penapatan Asli Daerah (PAD). Jawa Tengah: Universitas Semarang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Septiana Widya Ningsih dan Anim Rahmayati. 2018. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. Seminar Nasional dan The 5th Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli daerah(PAD). Jakarta.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Yani Rizal dan Miftahul Hidayah (2018). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, Vol 9, No 1 Januari 2018 P-ISSN 2089-1989 E-ISSN 2614-1523.
- Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/pajak>. DJP. Diakses pada 10 November 2021.